

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN  
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU  
(STUDI DI KELURAHAN PADANG TERUBUK  
KECAMATAN SENAPELAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**ZULTRIO FIRDA NA PUTRA**

**NPM : 147310495**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
8. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda dan Ibunda terkasih yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.

9. Keluarga Besar mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2014 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 1 November 2019  
Penulis  
Ttd.

Zultrio Firdana Putra



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Pemerintah Daerah.....	20
3. Konsep Kebijakan Publik.....	21
4. Konsep Evaluasi.....	26
5. Konsep Kawasan Permukiman Kumuh.....	33
B. Kerangka Pikir.....	38
C. Konsep Operasional.....	39
D. Operasionalisasi Variabel.....	41

E. Teknik Pengukuran.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Teknik Penarikan Sampel.....	48
E. Jenis dan Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	51
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	53
B. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	54
C. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	58
D. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kawasan Permukiman.....	59
E. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	59
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Identitas Responden.....	63
1. Jenis Kelamin.....	63
2. Tingkat Pendidikan .....	64
3. Tingkat Usia.....	66
B. Hasil Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru. ....	68
1. Efektivitas .....	68

2. Kecukupan .....	73
3. Pemerataan .....	78
4. Responsivitas.....	83
5. Ketepatan .....	87
C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	94
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	98
<b>LAMPIRAN</b> .....	100

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Penetapan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 .....	11
II.1 : Pelaksanaan Evaluasi dapat diukur dengan menggunakan Indikator Evaluasi menurut Duun (2003) .....	28
II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	41
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	48
III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	52
IV.1 : Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	60
IV.2 : Sarana dan Prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	61
V.1 : Distribusi Indentitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
V.2 : Distribusi Indentitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	64



V.3 : Distribusi Indentitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ....	65
V.4 : Distribusi Indentitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	66
V.5 : Distribusi Indentitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia.....	67
V.6 : Distribusi Indentitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia.....	67
V.7 : Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	69
V.8 : Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	71
V.9 : Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	74
V.10: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	76

V.11: Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	79
V.12: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	81
V.13: Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	83
V.14: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	85
V.15: Distribusi Tanggapan Pegawai Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	88
V.16: Distribusi Tanggapan Masyarakat Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	90
V.17: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	92
V.18: Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	38
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner untuk Responden Pegawai tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	100
2. Daftar Kuisioner untuk Responden Masyarakat tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	113
3. Daftar Wawancara penelitian tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	125
4. Daftar Data Telly Penelitian tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	127
5. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru .....	129



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zultrio Firdana Putra  
NPM : 147310495  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan, Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 November 2019  
Pelaku Pernyataan,



Zultrio Firdana Putra

**EVALUASI PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN  
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

**Oleh  
Zultrio Firdana Putra**

Kata Kunci : Evaluasi Program, Lingkungan Sehat Perumahan, Kawasan Permukiman Kumuh;

Kota pekanbaru merupakan kota terbesar di provinsi riau selain itu kota pekanbaru sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi, dengan demikian perkembangan yang terjadi juga semakin tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik kota pekanbaru jumlah masyarakat kota pekanbaru saat ini mencapai satu juta jiwa, dengan bertambahnya angka manusia yang memadati di kota pekanbaru maka secara otomatis juga akan memaksa fasilitas bangunan dan tempat tinggal harus di tingkatkan. Pada tahun 2016 pemerintah kota pekanbaru sudah mencanangkan pekanbaru akan bebas dari permasalahan kawasan permukiman kumuh, akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini tidak sesuai dengan perencanaan yang telah di lakukan secara kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota pekanbaru, berdasarkan Peraturan Walikota pekanbaru No 95 Th 2016 merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan permukiman. Maka dari itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota pekanbaru membuat program Lingkungan Sehat Perumahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian berbentuk deskriptif. Dalam mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh di ukur dengan lima indikator yaitu: eektivitas, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang terdiri data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tergolong cukup Baik.

**EVALUATION OF HOUSING HEALTHY ENVIRONMENTAL PROGRAMS  
BY THE PEOPLE'S HOUSING AND SETTLEMENT AREA IN  
OVERCOMING THE PROBLEM OF THE SETTLEMENT OF THE SLUM  
SETTLEMENT IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**By  
Zultrio Firdana Putra**

**Keywords: Program Evaluation, Housing Healthy Environment, Slums Area;**

*Pekanbaru City is the largest city in Riau Province besides the city of Pekanbaru as a city with a high rate of migration and urbanization growth, thus the development that occurs is also higher. Based on the data that the writer got from the Pekanbaru City Statistics Agency, the number of people in the city has reached one soul, with the increase in the number of people who are crowded in the city of Pekanbaru it will automatically force the building and residential facilities to be increased. In 2016 the city government of Pekanbaru had declared that Pekanbaru would be free from the problems of slum areas, but in reality up to now it was not in accordance with the plans that had been carried out institutionally by the Public Housing and Settlement Areas in the city of Pekanbaru, based on the Pekanbaru Mayor Regulation No 95 Th 2016 is a regional work unit that carries a portion of regional government affairs in the field of housing and settlements. Therefore, the Public Housing and Urban Settlements Agency Pekanbaru has a Healthy Environment Housing program. The purpose of this study was to determine the evaluation of the Healthy Environment Housing program by the Department of Public Housing and Settlement Areas, and to find out what are the factors inhibiting the Healthy Environment Housing program by the Department of Public Housing and Settlement Areas. The methodology used in this study is quantitative with descriptive research type. In overcoming the problem of slums, it is measured by five indicators, namely: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Types and data collection techniques consisting of primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data techniques that were collected with observation techniques. The results of this study indicate that the Healthy Environment Housing program by the Department of Public Housing and Settlement Areas is quite good.*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan beberapa permasalahan yang belum mampu terselesaikan, salah satu permasalahan pokok negara berkembang ialah sarana dan prasarana permukiman penduduk yang masih tergolong padat dan kumuh. Permasalahan ini memberi dampak yang multi dimensi, diantaranya dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan, tatanan sosial budaya, lingkungan fisik, serta dimensi politis. Akibat yang ditimbulkan dari permukiman kumuh adalah meningkatnya tindakan kriminalitas yang tercipta dari rendahnya ekonomi masyarakat dan sulitnya mencari peluang kerja.

Negara pada hakikatnya adalah suatu sistem, yang terdiri dari berbagai sub sistem yang merupakan prasyarat bagi keberfungsian dan keberlangsungan Negara. Pemerintah memiliki tugas dan pokok dasar Pemerintahan yakni “Pelayanan” dalam bentuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga bagaimana kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga bagaimana bentuk institusi pemerintah baik ditingkat pemerintah maupun pada pemerintah daerah mengkondisikan bagaimana organisasi pemerintah itu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif secara kelembagaan kepada masyarakat sebagai unsur yang dilayanin, sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.



Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem tersebut adalah dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Ada beberapa macam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di kenal dunia seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Negara Republik Indonesia sendiri saat ini (setelah amandemen UUD 1945) menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Jika suatu sistem penyelenggaraan pemerintah dilihat dari elemen yang ada didalamnya maka tatanan atau susunan pemerintahan berupa suatu struktur yang terdiri dari elemen pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara

elemen tersebut baik secara vertikal (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) maupun horisontal (Pemerintah Daerah).

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, **Pemerintah daerah** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah.

#### 1) Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama.

#### 2) Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

#### 3) Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; Dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi:

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanian;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi Dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan Dan Olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; Dan
18. Kearsipan.

#### 4) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.



## 5) Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Didalam ilmu pemerintahan, maksud pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.

Sebagai negara berkembang, sarana dan prasarana permukiman penduduk di Indonesia masih tergolong padat dan kumuh. Permasalahan ini memberi dampak yang multi dimensi, diantaranya dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan, tatanan sosial budaya, lingkungan fisik, serta dimensi politis. Akibat yang ditimbulkan dari permukiman kumuh adalah meningkatnya tindakan kriminalitas yang tercipta dari rendahnya ekonomi masyarakat. Maka dalam hal ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang dalam hal ini merupakan tugas daripada OPD yang tepatnya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah :

“Permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian”.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, daerah kumuh (*slum area*) diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman ataupun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya

berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat.

Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman di banyak kota besar, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diokupasi untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota, dan di bawah jembatan. Adapun kriteria daripada kawasan kumuh ini antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi.
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi subsisten yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
5. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, dll.
6. Pertumbuhannya tidak tertencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus.
7. Kuatnya gaya hidup pedesaan atau tradisional
8. Ditempati secara illegal,
9. Dan biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tidak kriminal.

Kriteria kawasan permukiman kumuh dalam kota, dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang seperti : karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, bahwa kriteria fisik lingkungan, sosial ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Perumahan yang tidak teratur.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
3. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
4. Tingkat pendapatan masyarakat rendah.

5. Sebagian besar penghuni berpenghasilan tidak tetap.
6. Tingkat pengangguran tinggi.
7. Tingkat kerawanan sosial dan angka kriminalitas cukup tinggi.
8. Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.
9. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada area yang sesuai dengan perencanaan perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk permukiman.

Sedangkan pemukiman yang bersih dan layak huni atau pemukiman yang sehat adalah pemukiman yang tertata rapi dan pembangunannya sesuai dengan perencanaan, serta pemukiman ini mempunyai aksesibilitas yang baik. Adapun kriteria pemukiman yang layak dan sehat menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara)
2. Tersedia air bersih
3. Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya
4. Mempunyai aksesibilitas yang baik
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja
6. Tidak berada dibawah permukaan air setempat
7. Mempunyai kemiringan rata-rata.

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun karena faktor migrasi. Peningkatan jumlah penduduk yang juga di ikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan ruang dan penyediaan akan sarana dan prasarana permukiman.

Dari waktu ke waktu kebutuhan akan lahan di daerah perkotaan akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk,



sedangkan ketersediaan akan lahan strategis untuk permukiman relatif tetap. Oleh karena itu penduduk di kota memanfaatkan lahan yang terbatas untuk dijadikan tempat permukiman tanpa memperhatikan lagi kualitas lingkungan permukimannya.

Pembangunan permukiman di lahan yang terbatas menimbulkan masalah alih fungsi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang semestinya. Daya dukung lingkungan yang kurang memadai juga akan menimbulkan masalah permukiman yaitu tumbuhnya permukiman kumuh tidak layak huni didaerah perkotaan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman.

Di Indonesia penurunan kualitas lingkungan perumahan desa maupun kota banyak dijumpai pada daerah-daerah lingkungan padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan yang dirancang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota Metropolitan di Indonesia, hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di provinsi Riau. Selain itu kota Pekanbaru sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Wilayah metropolitan adalah sebuah pusat populasi besar yang terdiri atas kota sentral yang saling bertetangga dan daerah sekitarnya.

Dengan demikian, secara otomatis perkembangan yang terjadi juga akan semakin tinggi, dan jumlah penduduk yang ada di kota Pekanbaru juga semakin hari semakin bertambah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah masyarakat kota Pekanbaru saat ini mencapai angka 1 juta jiwa, dengan bertambahnya angka manusia yang memadati Kota Pekanbaru, maka secara otomatis juga akan memaksa fasilitas bangunan dan tempat tinggal harus ditingkatkan.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mencanangkan Pekanbaru akan bebas dari permasalahan kawasan kumuh, tetapi kenyataannya sampai pada saat ini realisasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah di lakukan.

Berdasarkan SK Walikota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi menjadi 5 (Lima) Kawasan Kumuh di masing-masing daerah, dan angka tersebut dapat di kategorikan cukup besar untuk Kota Pekanbaru.

Adapun lokasi yang menjadi kawasan kumuh yang di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru,

ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 94,10 Ha yang terbagi atas 16 kelurahan dalam 5 kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1 : Penetapan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017**

N	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan Perumahan Kelurahan	Total Luas Kawasan Perumahan
1	Kec Senapelan	Kampung	5.00	22.50

		Dalam	(H a)	( H a)
		Padang	5.30	
		Terubu k	(H a)	
		Kampung Bandar	9.50 (H a)	
		Kampung Baru	2.70 (H a)	
2	Kec Rumbai	Meranti Pandan	4.60 (H a)	15.00 ( H a)
		Sri Meranti	10.40 (H a)	
3	Kec Rumbai Pesisir	Lembah Sari	3.90 (H a)	17.60 ( H a)
		Limbangan	8.30 (H a)	



		Limbungan Baru	2.40 (H a)	
		Lembah Damai	3.00 (H a)	
4	Kec Pekanbaru Kota	Sukaramai	6.60 (H a)	16.00 ( H a)
		Tanah Datar	6.30 (H a)	
		Sumahilang	3.10 (H a)	
5	Kec Limapulu h	Pesisir	6.40 (H a)	23.00 ( H a)
		Rintis	9.50 (H a)	
		Tanjung Rhu	7.10 (H	

			a)	
--	--	--	----	--

*Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017.*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari 16 kelurahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh oleh Walikota Pekanbaru. Dari 16 kelurahan tersebut, peneliti hanya memilih satu kelurahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu Kelurahan Padang Terubuk.

Padang Terubuk merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Senapelan. Adapun luas Kelurahan Padang Terubuk adalah 1,54 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kelurahan Padang Terubuk yaitu berjumlah 8.002 orang, yang terdiri dari 4.034 orang laki-laki dan 3.968 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.796 KK, serta dengan kepadatan penduduk yaitu 5.196 km<sup>2</sup>.

Adapun yang menjadi penanggungjawab terhadap pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di Kota Pekanbaru adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, dimana Tugas Pokok Dan Fungsi dari Kedudukan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Bidang Pengawasan Kawasan Pemukiman yang tertera pada Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016, Pasal 14 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan permukiman.
2. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
  - b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
  - f. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
  - g. Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
  - h. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
  - j. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
  - k. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - l. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
  - m. Pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
  - n. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
  - o. Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
  - p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.

Adapun visi yang di tetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah : “Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Yang Handal, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera.”

Sejalan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada bagian kedua tentang tugas, maka pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) bertugas melaksanakan pembinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang salah satunya adalah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman di daerah.



Oleh sebab itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru membuat program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Adapun program yang dimaksud yaitu “PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN”. Untuk merealisasikan program tersebut, adapun langkah-langkah kegiatan yang dirumuskan untuk merealisasikan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman cenderung kumuh
2. Kegiatan pengendalian kawasan permukiman kumuh
3. Penataan dan pembangunan kawasan permukiman kumuh
4. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil observasi, adapun beberapa fenomena yang penulis temui di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Masih banyak lokasi kawasan padat penduduk yang masuk dalam kategori Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru, yang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Limapuluh. Ini artinya program “Lingkungan Sehat Perumahan” yang di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum terealisasi dengan baik.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menargetkan pembebasan Kota Pekanbaru dari permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh sejak tahun 2016, namun realisasinya sampai pada saat ini belum sesuai dengan apa yang telah menjadi target pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya, sehingga masih banyak kawasan permukiman kumuh, yang terbagi dalam 5 kecamatan.

3. Kurangnya perhatian pemerintah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terhadap situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, dimana keberadaan lokasi kawasan kumuh yang ada Di Kota Pekanbaru masuk dalam kategori sangat tinggi, hal ini di buktikan dari ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Ha yang terbagi dalam 5 (Lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Limapuluh.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru?

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.
- c. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **D. Studi Kepustakaan**

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

##### **1. Konsep Pemerintahan**

Menurut Syafiie (2010:35) Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Pemerintahan menurut Strong dalam Pamudji, yaitu organisasi dalam diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (*daerah Negara*) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (*seperti cabinet merupakan suatu pemerintah*) (Pramudji, 2002:23).

Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan dimana dalam paradigma lama pemerintahan memiliki objek materil Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun pada paradigma baru pemerintah di pandang memiliki objek materil masyarakat, sehingga pemerintah di maknai sebagai suatu proses



menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Yusri Munaf 2016 : 47).

Adapun fenomena semakin majunya masyarakat di ikuti dengan meningkatnya permasalahan di dalam nya, dan birokrasi yang cenderung terus semakin besar sehingga di sekitar awal dekade 90-an muncul suatu paradigma baru dalam pemerintahan yakni good governance berasal dari istilah governance (Yusri Munaf 2016 : 63).

Negara pada hakikatnya adalah suatu sistem, yang terdiri dari berbagai sub sistem yang merupakan prasyarat bagi keberfungsian dan keberlangsungan Negara. Pemerintah memiliki tugas dan pokok dasar Pemerintahan yakni “Pelayanan” dalam bentuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga bagaimana kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga bagaimana bentuk institusi pemerintah baik ditingkat pemerintah maupun pada pemerintah daerah mengkondisikan bagaimana organisasi pemerintah itu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif secara kelembagaan kepada masyarakat sebagai unsur yang dilayanin, sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem tersebut adalah dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Ada beberapa macam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di

kenal dunia seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Negara Republik Indonesia sendiri saat ini (setelah amandemen UUD 1945) menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Jika suatu sistem penyelenggaraan pemerintah dilihat dari elemen yang ada didalamnya maka tatanan atau susunan pemerintahan berupa suatu struktur yang terdiri dari elemen pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara elemen tersebut baik secara vertikal (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) maupun horisontal (Pemerintah Daerah).

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dalam pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan merupakan wujud nyata dari suatu

organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.

## 2. konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Philip Mahmud, pemerintah daerah ialah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.

Pemerintah daerah menurut C.F Strong adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan bedaulat atau tertinggi.

## 3. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktipitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai rangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyesuaian agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Di Indonesia menggunakan istilah “*kebijaksanaan dan kebijakan*” dari terjemahan *polcy* yang diartikan dengan keputusan

pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalkan dengan pengertian “*Public*” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan kebijaksanaan dengan kebijakan, yang membedakan istilah “*policy*” sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*discretion*” yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Kata kebijakan secara etimologi berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “negara kota”. Dalam bahasa Latin yaitu politik atau negara. Bahasa Inggris lama (*middle english*) dinilai *policie* berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2001).

Kemudian dalam bahasa Indonesia “kata kebijakan dan kebijaksanaan” bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “*wisdom*” asal katanya “*wise*”. Dari pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar “pintar atau cerdas (*smart*).

Pada saat persoalan publik menjadi lebih kompleks, tidak ada satupun masalah hanya di pandang hanya “satu” aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan



saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan berlaku secara cepat.

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Latief (2005;88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu, perilaku baik pejabat ataupun perorangan, kelompok kekuatan politik dan kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Anderson dalam Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa, kebijakan merupakan penegembang yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya. Sehingga kebijak tersebut dapat dikatakan bahwa:

- 1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud dan pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu
- 4) Kebijakan pemerintah bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

- 5) Kebijakan pemerintah dalam artian positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Menurut Raden Imam Al-Hafis dan Zaini Ali (2015;4) kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Menurut Charles O Jones (2001;47) kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) Tingkah-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Kebijakan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh *Policy Markes* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *Policy Markes* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar tersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Menurut Young dan Quin kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya (dalam Suharto, 2005:44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan

publik bisanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kemudian menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Korayati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai tumpuan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan.

Menurut Islamy (2000:17), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan. Defenisi kebijakan dapat dicermati dari defenisi berikut ini:

“Kebijakan adalah kata kebijaksanaan, yaitu perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindakan atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai” Latief (2005:88).

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrase dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, pada fase ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.



Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka dibutuhkan strategi dan formulasi yang baik. Formulasi dari kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan bagi implementasi kebijakan, menurut person (dalam Dahlan 2004:97). Secara metodologis klasifikasi pendekatan dalam formulasi kebijakan publik terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pengaplian kekuasaan (*power approach to policy*)
2. Pendekatan Rasionalitas (*Rationality and policy making*)
3. Kekuasaan dalam birokrasi (*public choice approach*)
4. Pembuat kebijakan (*personality*)
5. Proses pembuatan kebijakan (*Formatio Lochitian and Processingin policy making*).

Untuk mengukur suatu keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari proses implementasinya. Implementasi kebijakan mengutip pendapat Meter dan Horn adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

## 2. Konsep Evaluasi

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejauh mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dengan “kenyataan. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan

masukannya bagi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Subarsono (2005 : 123) alasan evaluasi kebijakan publik adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, (2) mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, (3) memenuhi aspek akuntabilitas, (4) menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan, (5) agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Adapun menurut Ndraha evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 2000:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:166) Evaluasi adalah suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejahtera mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara

“harapan dengan” kenyataan. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Arikunto dan Cepi dalam Afifudin (2013;251) Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut Dunn ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni :

1. Evaluasi semu (*pseudoevaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menyangkan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, dan masyarakat.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
3. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desion theoretic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara ekpelisid diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

Untuk menilai suatu keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Menurut Dunn (2003;49) mencakup lima indikator adalah:

**Tabel II.1: Pelaksanaan Evaluasi dapat di ukur dengan menggunakan Indikator Evaluasi menurut Duun (2003).**

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang diinginkan telah tercapai dalam memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada ke kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Resposivitas	Apakah hasil kebijakan preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber: Wiliam N Duun 2003.

Adapun menurut Ndraha dalam buku konsep Administrasi dan Administrasi Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses 30 perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 2000:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- a. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukuranya adalah *before*.
- b. Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.



- c. Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*ranting*), dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dunn, 2003;608).

Menurut Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Menurut pendapat diatas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan keluaran. Evaluasi juga digunakan untuk

mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013;126), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektivitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126) seperti yang telah sebutkan di atas dapat dikembangkan dalam masing-masing pengertiannya, yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dun mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

c. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003: 434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas

Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

e. Ketepatan

Ketepatan menunjuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang

dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan hubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substantif tujuan bukan cara atau instrument untuk menyelesaikan tujuan tersebut.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Nugroho, 2008;184).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk



menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

### **3. Konsep Kawasan Permukiman Kumuh**

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan permukiman kumuh. Sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian prinsip mereka harus hemat dalam arti yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan sistem strukturnya (Sobirin, 2001:41).

Akibatnya, muncul permukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah. Dalam berbagai literatur dapat dilihat berbagai kriteria dalam menentukan kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan permukiman. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan

Farid Kurniawan, 2000:8-9), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu :

1. Kondisi bangunan atau rumah,
2. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan,
3. Kerentanan status penduduk, dan
4. Berdasarkan aspek pendudukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat. Berdasarkan kriteria tersebut maka studi tersebut menentukan tiga skala permukiman kumuh, yaitu tidak kumuh, kumuh dan sangat kumuh.

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitek tersebut, Laboratorium Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya (Rudiyantono, 2008:8), hanya menentukan dua standart permukiman kumuh, yaitu :

1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari stuktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan dan tatanan bangunan.
2. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat tingkat kekumuhan permukiman.

Johan Silas, seorang pakar dalam bidang arsitektur dan permukiman kumuh (Titisari dan Farid Kurniawan, 2000:8), menjelaskan bahwasanya kriteria

pokok untuk menentukan permukiman kumuh/marjinal adalah: bila berada di lokasi yang ilegal, dengan keadaan fisiknya yang sub standar; penghasilan penghuni amat rendah (miskin), tak dapat dilayani berbagai fasilitas kota; dan tidak diinginkan kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan).

Berdasarkan kriteria Silas tersebut, aspek legalitas juga merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kekumuhan suatu wilayah selain buruknya kondisi kualitas lingkungan yang ada. Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya permukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya adalah permukiman.

Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu house dan land settlement. Permukiman memberikan kesan tentang pemukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi (Kurniasih, 2007).

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan (Kurniasih, 2007).

Menurut UU Nomor 4 pasal 22 tahun 2002 tentang perumahan dan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Masrun (2009) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan.

Gambaran lingkungan kumuh, (Khomarudin, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan,
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,
3. Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan,



4. Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni,
5. Lingkungan dan tata permukiman tidak teratur tanpa perencanaan,
6. Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan),
7. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan),
8. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal, 9. Pendidikan masyarakat rendah.

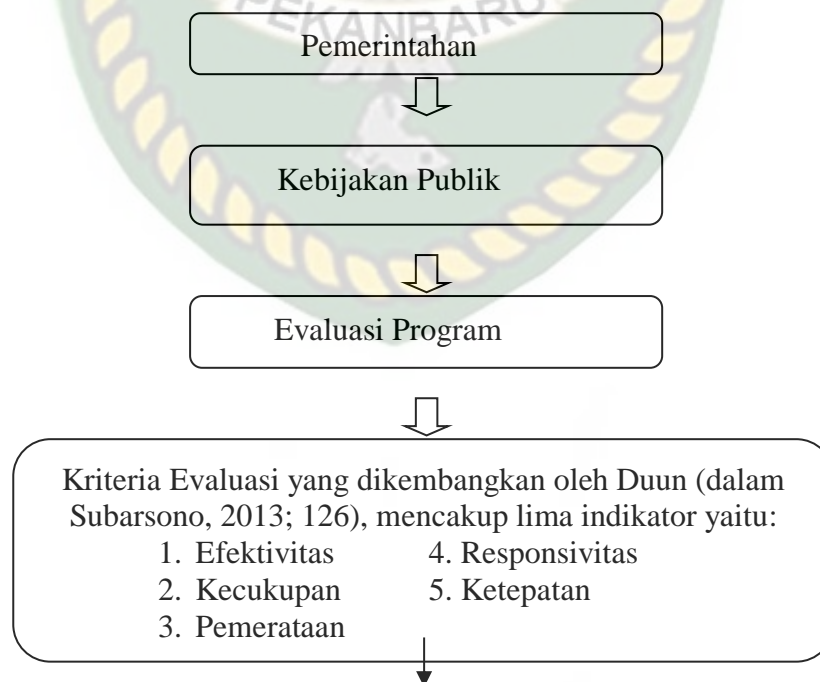
Dalam perkembangannya pertumbuhan permukiman kumuh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Doxiadis (2001), disebutkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. *Growth of density* (pertambahan penduduk) Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.
2. *Urbanization* (Urbanisasi) Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan kota.

## E. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan buatan sendiri dengan panduan ataupun teori yang di gunakan sebagai bahan untuk mengukur berhasil atau tidaknya penelitian. Berdasarkan kajian teori yang diterangkan, maka gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**





Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.

## F. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.
2. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu selernya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai secara berkala apa yang telah dihasilkan melalui pengukuran indikator kinerja utama untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan-tujuan utama dalam program lingkungan sehat perumahan.

4. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
5. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
6. Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria pemerataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.
7. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.



8. Ketepatan menunjuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dunn menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan hubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substantif tujuan bukan cara atau instrument untuk menyelesaikan tujuan tersebut.
9. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

#### **G. Operasional Variabel**

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang mana sebagai variabel 1 penelitian adalah Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Evaluasi adalah suatu penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ) dan penilaian ( <i>assessment</i> ), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam	Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.	1. Efektivitas	a. Pembentukan Program Mengatasi Pemukiman Kumuh. b. Pelaksanaan Sosialisasi Program.	Baik Cukup Kurang Baik
		2. Kecamatan	a. Pelaksanaan Program Di Lapangan. b. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Masyarakat Di Pemukiman Kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Pemerataan	a. Pelaksanaan Program Dilakukan secara merata diseluruh lokasi pemukiman kumuh. b. Melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan pemukiman kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

arti satuan nilai ya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dunn, 2003: 608).	4.	a. Melakukan Analisis Terhadap Perkembangan Kawasan Pemukiman Kumuh. b. Melakukan Tindakan Pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan pemukiman kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
	5.	a. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman cenderung kumuh. b. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman kumuh.	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Penulis, 2019.

#### H. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Baik (3 Skor), Cukup Baik (2 Skor), dan yang terakhir adalah Kurang Baik (1 Skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

- Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru berada pada skala 67% - 100%
- Cukup Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru berada pada skala 34% - 66%
- Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru berada pada skala 0% - 33%



## 1. Efektivitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala pengukuran 67% - 100%.

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala pengukuran 34% - 66%.

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Efektivitas berada pada skala pengukuran 0% - 33%.

## 2. Kecukupan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kecukupan berada pada skala pengukuran 0% - 33%

### 3. Pemerataan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pemerataan berada pada skala pengukuran 0% - 33%

### 4. Responsivitas

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 67% - 100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 34% - 66%

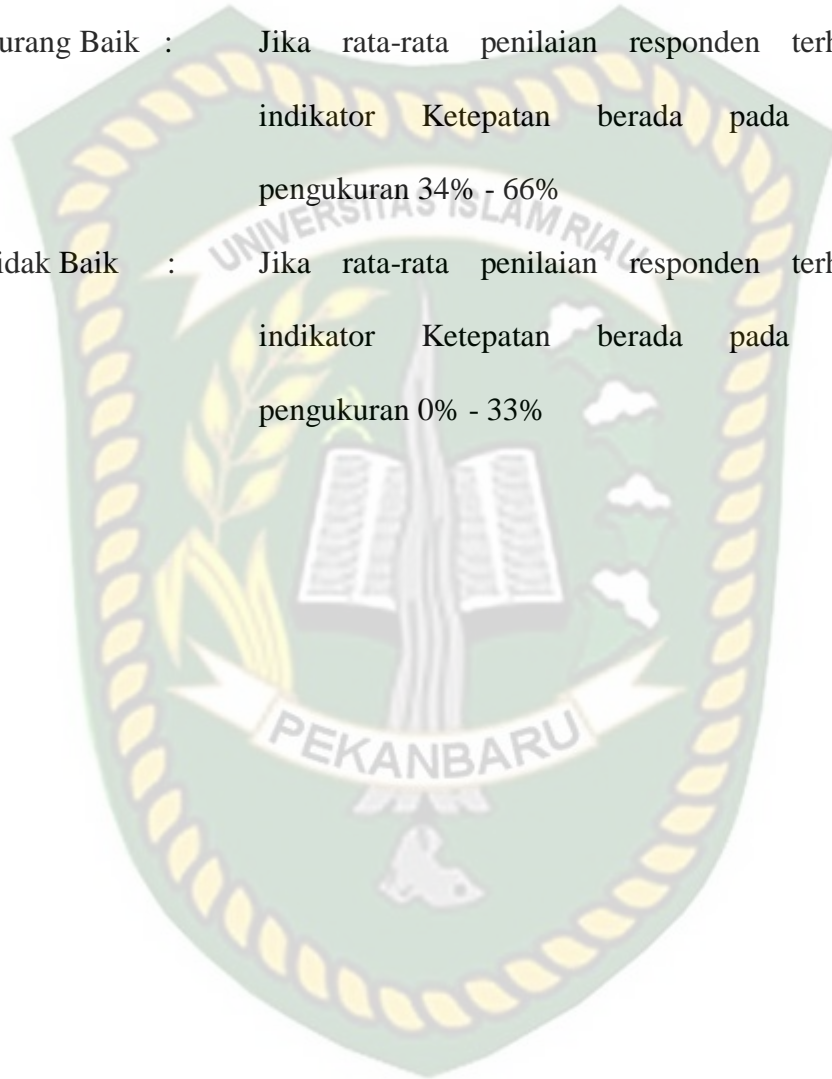
Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Responsivitas berada pada skala 1% - 33%

## 5. Ketepatan

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Kurang Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Ketepatan berada pada skala pengukuran 0% - 33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbentuk deskriptif yang artinya peneliti berusaha menggambarkan atau melukiskan secara keseluruhan tentang bagaimana Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif menggunakan data dan menekankan hasil penelitian pada pengukuran yang obyektif.



## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan Parit Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah didasari dengan fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan, dimana penulis ingin melakukan penelitian mengenai program Lingkungan Sehat Perumahan dalam rangka mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Dimana berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, permasalahan kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru sudah dibuat rancangan pembebasan Kota Pekanbaru dari kawasan pemukiman kumuh mulai tahun 2016, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat banyak kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dan Masyarakat.

#### 2. Sampel

Dalam hal ini yang menjadi sampel peneliti dalam melakukan penelitian program Lingkungan Sehat Perumahan ialah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan Masyarakat.

**Tabel III.1 : Populasi dan Responden Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.**

Subjek	Populasi	Sampel	Persentase
Pegawai Dinas	1	1	100 %
Masyarakat	1	1	100 %
Dinas dan Kawasan Permukiman	1	1	100 %
Pendataan dan Perencanaan Permukiman	1	1	100%
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	1	1	100%

	Pemanfaatan dan Pengendalian	1	1	100%
	Penyediaan dan Pelaksanaan	1	1	100%
	Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
	Masyarakat	30	30	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik sensus, yang dimana teknik ini di tujukan untuk pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Masyarakat.

#### E. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data antara lain sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Evaluasi



Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Apabila wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009;82) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

**H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Adapun rincian jadwal kegiatan penelitian tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																														
		Juni			Juli			Agustus			Oktober																					
1	Penyusunan UP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2	Seminar UP																															
3	Revisi UP																															
4	Revisi Kuisi oner																															
5	Rekomendasi Surve y																															
6	Survey Lapan gan																															
7	Analisis Data																															
8	Penyusunan Laporan Hasil Peneli tian																															
9	Konsultasi Revisi Skripsi																															
1	Ujian																															





## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru**

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, telah ditetapkan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah membantu Gubernur Riau melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Pelaksanaan Administrasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Mengacu pada uraian tersebut, pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas Perkimtan dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian yaitu pelayanan:

- **Penyelenggaraan Perumahan**, yang meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan.
- **Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**, yang dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman yang telah ada, pembangunan kawasan permukiman baru atau pembangunan kembali kawasan permukiman dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan : perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian.
- **Penyelenggaraan Pertanahan**, yang meliputi perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, inventarisasi tanah ulayat/adat, identifikasi dan fasilitasi sengketa tanah maupun ganti rugi tanah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

## **B. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 telah ditetapkan Visi Provinsi Riau Berikut ini:

### **Visi**

**“Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu Dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur.”**

Selanjutnya terhadap Visi Provinsi Riau dianalisis rumusan, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya di perjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

### **Misi I**

**“Meningkatkan Pembangunan Infarstruktur.”**

#### **1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur Permukiman**

Sasaran:

- Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi

- Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Strategi:

- Pembangunan dan Peningkatan Infarstruktur Permukiman
- Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh

Arah Kebijakan:

- Pembangunan dan Peningkatan Infarstruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi
- Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh Yang Menjadi Kewenangan Provinsi

## **2. Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Keterpaduan Sarana dan Prasarana Pada Kawasan Permukiman**

Sasaran:

- Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan;

Strategi:

- Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman

Arah Kebijakan;

- Pembangunan dan Peningkatan PSU Permukiman Perkotaan di 12 Kabupaten/ Kota Provinsi Riau.

## **Misi II**

**“Menurunkan Kemiskinan.”**

### **1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Masyarakat Miskin**

Sasaran:



- Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat

Strategi:

- Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin

Arah Kebijakan:

- Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Bagi Masyarakat Miskin Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat

### Misi III

**“Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya Serta Pemantapan Kehidupan Politik.”**

#### **1. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan**

Sasaran:

- Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan

Strategi:

- Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum

Arah Kebijakan:

- Percepatan Pelayanan Dalam Pemberian Izin dan Penetapan Lokasi Untuk Persiapan Pengadaan Tanah Kepentingan Umum.

#### **2. Tujuan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sasaran:

- Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perangkat Daerah

Strategi:

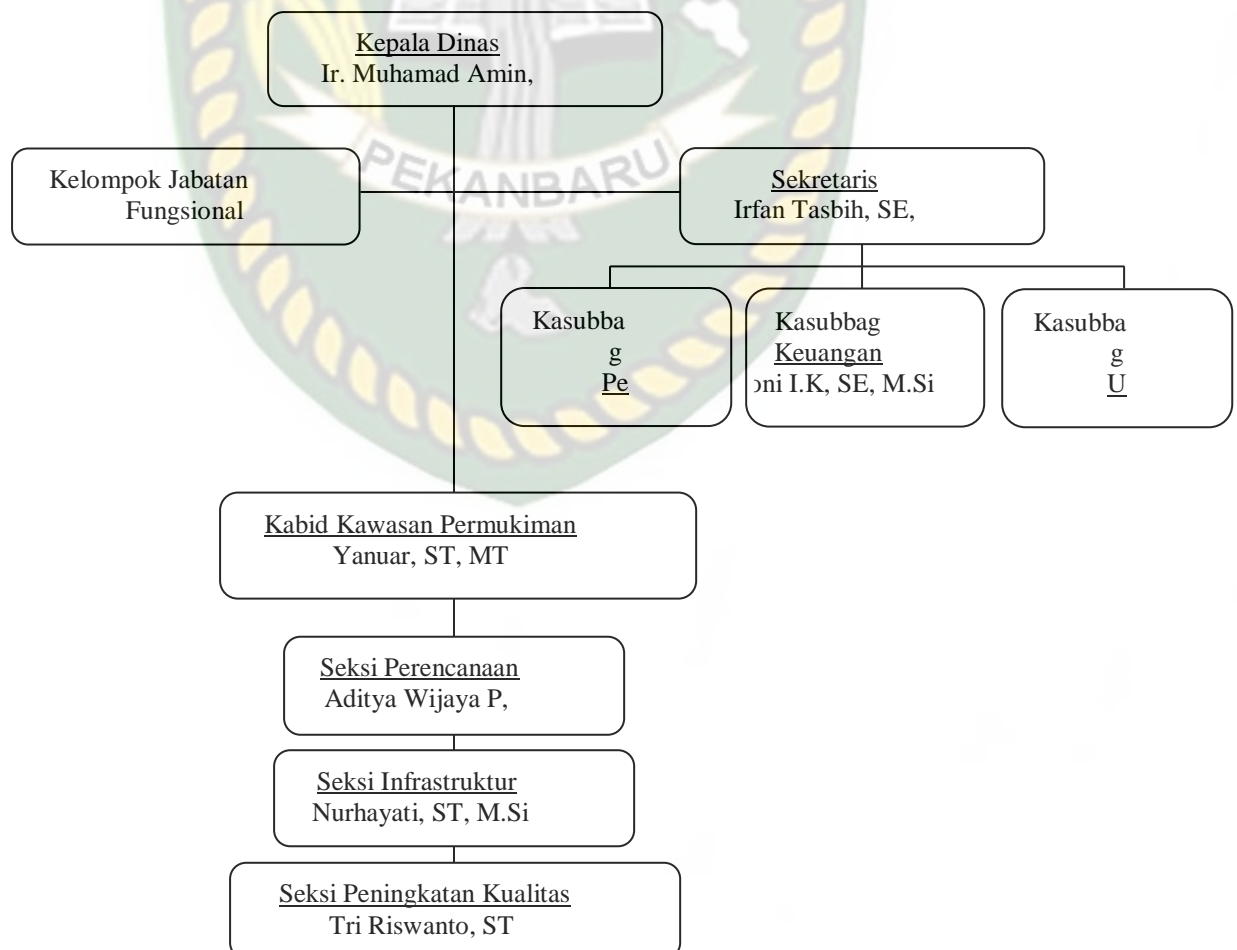
- Pemantapan Tata Kelola dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Arah Kebijakan:

- Penguatan Kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan aparatur.

### C. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru



Sumber: Data Penelitian, 2019.

#### **D. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Kawasan Permukiman**

- 1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis, Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kawasan Permukiman;
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman;
  - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **E. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah. Terkait hal tersebut

diatas, berikut ini data sumber daya manusia atau data kepegawaian pejabat struktural di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 : Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru**

N	Jabatan	Nama	Kategori
1	Kepala Dinas	Ir. Muhamad Amin, M.Eng	IV/ b
2	Sekretaris	Irfan Tasbih, SE, M.Si	IV/ b
3	Kasubbag Perencanaan Program	Yulismar, ST, MT	Pe n a t a  T k . I  I



			I I / d
4	Kasubbag Keuangan	Roni Indrakusuma, SE, M.Si	IV/ a
5	Kasubbag Umum	Said Mukhsin, S.Sos	III/ d
6	Kabid Perumahan	Ir. Armansyah Aniputra, MT	IV/ b
7	Kabid Sarana Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)	Imam Subroto, ST	Pe n a t a  T k . I  I I

			I / d
8	Kabid Pertanahan	Irwan Suryawan, S.Sos, M.IP	IV/ a
9	Kabid Kawasan Permukiman	Yanuar, ST, MT	IV/ b
1	Kasi Perencanaan	Aditya Wijaya Raisnur P, MT	III/ b
1	Kasi Infrastruktur	Nurhayati, ST, M.Si	III/ c
1	Kasi Peningkatan Kualitas	Tri Riswanto, ST	III/ b

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pejabat struktural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berjumlah 12 orang. Dari keseluruhan pejabat struktural diatas terlihat semuanya merupakan lulusan sarjana dan beberapa magister serta memiliki golongan yang cukup tinggi. Maka dari itu diharapkan mereka dapat menunjukkan kinerjanya yang lebih baik lagi, khususnya dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, organisasi merupakan suatu penggabungan benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang bertalian

dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Adapun data asset yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2: Sarana dan Prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**

	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Tanah Gedung Kantor	986	M2
	Kendaraan Roda Empat	35	Unit
	Kendaraan Roda Dua	37	Unit
	Filling Kabinet	29	Unit
	Kursi	225	Unit
	Laptop	57	Unit
	Lemari	45	Unit
	Mesin Tik	15	Unit
	Meja Computer	34	Unit
	Monitor	9	Unit
	Papan Struktur	11	Unit
	Wireless	14	Unit
	Komputer	54	Unit
	UPS/Stabilizer	27	Unit
	TV	13	Unit

	Rak TV	12	Unit
	Mesin Fotocopy	4	Unit
	OHP	9	Unit
	Rak Arsip	40	Unit
	Printer	60	Unit
	Rak Kertas	17	Unit
	Dispenser	20	Unit
	Hard Disk Eksternal	15	Unit
	Kulkas	7	Unit
	Rolling Filling	4	Unit
	Scanner	12	Unit
	AC	35	Unit
	Mesin Potong Rumput	4	Unit
	Sofa/Kursi Tamu	10	Unit
	Gorden	8	Unit
	Tiang Bendera	1	Unit
	Tabung Racun Api	8	Unit
	Mesin Absensi	44	Unit
	Mesin Pompa Air	4	Unit
	Plang Nama Kantor	2	Unit
	White Board	8	Unit
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



	Pot Bunga	34	Unit
	Meja Kerja	94	Unit
	Mesin Penghancur Kertas	6	Unit
	Penunjuk Waktu	6	Unit
	Brangkas	1	Unit
	Terali	1	Unit
	Gambar/Ukiran	9	Unit
	Tempat Tidur	8	Unit
	Tangki Air	10	Unit
	Tower Air	2	Unit
	Instalasi TV/Listrik	4	Unit
	Jaringan Computer	3	Unit
	Instalasi Telepon	1	Unit
	Jaringan Internet	1	Unit
	Handy Camp	8	Unit
	Server	4	Unit
	Kamera	10	Unit
	Megaphone	12	Unit

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total sarana dan prasarana di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berjumlah 54 jenis barang, dan ini tergolong sangat cukup memadai untuk kelangsungan kerja seluruh sumber daya manusia pada

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Sehingga tidak menghalangi serta menghambat kerja para pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk bekerja lebih baik lagi demi kesejahteraan bersama, khususnya dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### F. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah delapan orang pegawai dan tiga puluh orang masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

#### 1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Kota Pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
	Laki-laki	7	88%
	Perempuan	1	12%
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden pegawai dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat

Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru terdiri dari 7 orang jenis kelamin laki-laki (88%) dan 1 orang jenis kelamin perempuan (12%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin pegawai di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 88%.

**Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	20	67%
Perempuan	10	33%
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden masyarakat dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru terdiri dari 20 orang jenis kelamin laki-laki (67%) dan 10 orang jenis kelamin perempuan (33%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin masyarakat di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 67%.

## 2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan



Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru terdiri dari dua tingkat pendidikan yaitu S1 dan S2. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	S1	1	12%
2	S2	7	88%
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru terdiri dari 1 orang pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 (12%), dan 7 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan S2 (88%). Dari uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan pegawai di dominasi oleh lulusan S2 yaitu dengan persentase 88%.

Selanjutnya adapun identitas responden masyarakat dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi

Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.4 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTP	3	10%
2	SLTA	22	74%
3	Diploma	1	3%
4	Sarjana	4	13%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber:* Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru terdiri dari 22 orang memiliki tingkat pendidikan SLTA (74%) jumlah tertinggi dan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 1 orang (3%) jumlah terendah. Dari uraian tersebut terlihat tingkat pendidikan masyarakat di dominasi oleh lulusan SLTA yaitu dengan persentase 74%.

### 3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih

matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi Identitas Responden Pegawai Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia**

Tingkat Usia	Responden	Persentase
20 – 30	1	12%
31 – 40	2	25%
41 – 50	5	63%
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

*Sumber* : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru yang berada pada usia 20-30 berjumlah 1 orang (12%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 2 orang (25%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 5 orang (63%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden pegawai yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun.

**Tabel V.6 : Distribusi Identitas Responden Masyarakat Dalam Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan**

**Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Usia**

	<b>Tingkat Usia</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase</b>
	20 – 30	4	13%
	31 – 40	10	33%
	41 – 50	16	54%
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

*Sumber* : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru yang berada pada usia 20-30 berjumlah 4 orang (13%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 10 orang (33%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 16 orang (54%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden masyarakat yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada umur 41-50 Tahun.

**G. Hasil Penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hal ini



bertujuan untuk mengevaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.

### 1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi (Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman), dan program lingkungan sehat perumahan.

Kawasan pemukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang cukup penting untuk dibahas, karena dewasa ini masyarakat banyak mengeluhkan mengenai kawasan pemukiman kumuh yang tidak kunjung teratasi. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan mengenai kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru, salah satu indikatornya adalah efektivitas. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pembentukan program Lingkungan Sehat Perumahan dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan sosialisasi program Lingkungan Sehat Perumahan dengan masyarakat dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator efektivitas, dapat dilihat pada tabel V.7 berikut:

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi**

**Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Nilai
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	
2	3	4	5	5
1) membentuk program untuk mengatasi pemukiman kumuh	3 (0%)	-	-	3
2) oleh lama Dinas membentuk program tersebut	4 (0%)	4 (0%)	-	3
3) program tersebut sudah bisa mengatasi kawasan kumuh	4 (0%)	4 (0%)	-	3
4) melibatkan masyarakat dalam pembentukan program	5 (0%)	2 (0%)	-	3
2	3	4	5	5
5) masyarakat senang dengan adanya program ini	3 (0%)	-	-	3
6) telah melakukan sosialisasi	3	-	-	3

program dengan masyarakat	0%)			
pat sosialisasi program dengan masyarakat dilakukan	4 0%)	4 0%)		
ng melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	4 0%)	4 0%)		
getahui apa yang dibahas dalam sosialisasi program	3 0%)			
Jumlah	4	8		2
Rata-rata	5	2		
Persentase	%	%	%	0%)

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.7 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator efektivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman

Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator efektivitas sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator efektivitas, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kawasan kumuh di kota pekanbaru tergolong banyak, ada 8 kawasan, yaitu yang terdiri dari 16 kelurahan. Jumlahnya mencapai 113,56 Ha yang terbagi dalam 5 (Lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Senapelan, Rumbai, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Limapuluh. Adapun langkah kami selaku dinas yang bertanggung jawab menangani permasalahan Kawasan pemukiman kumuh, kami membuat program yang Namanya Program Lingkungan Sehat Perumahan. Program ini bertujuan untuk membrantas lingkungan Kawasan kumuh di kota pekanbaru. Dan alhamdulillah dari hasil program ini, telah teratasi Kawasan kumuh sebanyak 50 persen. Artinya dari keseluruhan luas Kawasan kumuh, kami sudah menangani separuhnya. Yang jelas dari segi efektivitas, Program Lingkungan Sehat Perumahan ini sudah cukup baik dalam mengatasi Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru”.*

(Wawancara : Senin, 1 September 2019).



Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator efektivitas yang terdiri dari dua sub indikator, dengan sembilan item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini :

**Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	
2	3	4	5	5
1) membentuk program untuk mengatasi pemukiman kumuh	30 (%)	0 (%)	0 (%)	0
2) apakah lama Dinas membentuk program tersebut	4 (%)	0 (%)	5 (%)	0
3) apakah program tersebut sudah bisa mengatasi kawasan kumuh	5 (%)	5 (%)	0 (%)	0

batkan masyarakat dalam pembentukan program	0 (%)	0 (%)		0
asyarakat senang dengan adanya program ini	0 (%)	0 (%)		0
h melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	8 (%)	2 (%)		0
pat sosialisasi program dengan masyarakat dilakukan	5 (%)	5 (%)		0
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
ng melakukan sosialisasi program dengan masyarakat	5 (%)	4 (%)	0 (%)	0
getahui apa yang dibahas dalam sosialisasi program	2 (%)	6 (%)	2 (%)	0
Jumlah	20	32	8	70
Rata-rata	3	5	2	0
Persentase	%	%	%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator efektivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 43%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator efektivitas sudah cukup baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator efektivitas, peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah membuat program Lingkungan Sehat Perumahan. Program ini digadang-gadangkan dapat mengatasi permasalahan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru. Langkah-langkah dari program ini yaitu diawali dengan melakukan Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman cenderung kumuh, kemudian dilakukan kegiatan pengendalian kawasan pemukiman kumuh, setelah itu dilakukan Penataan dan pembangunan kawasan pemukiman kumuh, kemudian dilakukan Pendataan dan perencanaan kawasan pemukiman kumuh.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan

Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator efektivitas sudah cukup baik.

. Sehingga wajar saja jika indikator efektivitas pada penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dinyatakan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator efektivitas dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

## **2. Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai, sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Kecukupan dalam penelitian ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas program lingkungan sehat perumahan dalam memuaskan kebutuhan masyarakat, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru.



Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan program Lingkungan Sehat Perumahan pada lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator kecukupan, dapat dilihat pada tabel V.10 sebagai berikut:

**Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	
Melaksanakan program lingkungan sehat di lokasi	3 (37,5%)	4 (50%)	1 (12,5%)	8
Program tersebut dapat mengatasi permasalahan	4 (50%)	4 (50%)	0 (0%)	8
Program tersebut sudah berjalan secara efektif	4 (50%)	4 (50%)	0 (0%)	8
Membantu/membatikan masyarakat	4 (50%)	4 (50%)	0 (0%)	8

dalam pelaksanaan program	0%)	0%)		
masyarakat sudah merasakan manfaat dari program	30%)			
melakukan pembinaan terhadap masyarakat	40%)	40%)		
sering pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan	20%)	50%)		
pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat bagus	40%)	40%)		
partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan	20%)	50%)		
pelaksanaan pembinaan sudah berjalan secara efektif	20%)	50%)		
Jumlah	0	0		0
Rata-rata	4	4		
Persentase	0%	0%	0%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator kecukupan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 50%, cukup baik dengan jumlah persentase 50%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator kecukupan sudah baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator kecukupan, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kawasan kumuh di kota pekanbaru ada delapan kawasan, yaitu terdiri dari kawasan lembah damai, kawasan rumbai pesisir, kawasan kota lama, kawasan meranti, kawasan pesisir, kawasan sungai sago, Kawasan sumahilang, dan kawasan padang terubuk. Jumlah luas keseluruhannya yaitu 113,56 Ha. Dari delapan Kawasan tersebut, kewenangan kami hanya menangani dua Kawasan, yaitu Kawasan sumahilang dan Kawasan padang terubuk. Adapun langkah kami selaku dinas yang bertanggung jawab menangani permasalahan*

*Kawasan pemukiman kumuh, kami membuat program yang namanya Program Lingkungan Sehat Perumahan. Dalam program ini kami membangun drainase dan hydrant kebakaran. Sebelum melakukan pembangunan, kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat, yakni melakukan inventarisir terhadap masyarakat sekitar yang memiliki kemauan serta kemampuan kerja agar masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Selain itu juga kami berpesan kepada masyarakat agar dapat menjaga lingkungan yaitu dengan memelihara pembangunan yang telah dibangun dan tidak membuang sampah sembarangan. Hasil dari program ini sudah dirasakan masyarakat, yakni tidak lagi banjir ketika hujan turun. Yang pasti dari segi kecukupan, Program Lingkungan Sehat Perumahan ini sudah cukup baik dalam mengatasi Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru". (Wawancara : Senin, 1 September 2019).*

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator kecukupan yang terdiri dari dua sub indikator, dengan sepuluh item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.11 berikut ini :

**Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**



Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Nilai
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	
Melaksanakan program lingkungan sehat di lokasi	0 (%)	0 (%)	0 (%)	0
Program tersebut dapat mengatasi permasalahan	0 (%)	2 (%)	3 (%)	0
Program tersebut sudah berjalan secara efektif	3 (%)	8 (%)	4 (%)	0
Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program	2 (%)	2 (%)	5 (%)	0
Masyarakat sudah merasakan manfaat dari program	0 (%)	3 (%)	2 (%)	0
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat	2 (%)	4 (%)	4 (%)	0
Program sering pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan	3 (%)	2 (%)	0 (%)	0

binaan yang dilakukan kepada masyarakat bagus	5 (%)	2 (%)	2 (%)	0
partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan	0 (%)	9 (%)	1 (%)	0
kegiatan pembinaan sudah berjalan secara efektif	5 (%)	9 (%)	5 (%)	0
Jumlah	12	16	2	00
Rata-rata	1	2	7	0
Persentase	%	%	%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator kecukupan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 37%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 23%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator kecukupan

dikategorikan cukup baik dengan persentase 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator kecukupan, peneliti melihat bahwa dalam merealisasikan program lingkungan sehat perumahan, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Pekanbaru membangun drainase dan hydrant kebakaran. Sebelum melakukan pembangunan, pihak dinas terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat, yakni melakukan inventarisir terhadap masyarakat sekitar yang memiliki kemauan serta kemampuan kerja agar masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Hasil dari program ini sudah dirasakan masyarakat, yakni tidak lagi banjir ketika hujan turun di kelurahan padang terubuk, namun kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih kurang, sehingga lingkungan masih terlihat kotor dan kurang bersih.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator kecukupan berada dalam kategori cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

### 3. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan efisien apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan program Lingkungan Sehat Perumahan dilakukan secara merata di seluruh lokasi permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator pemerataan, dapat dilihat pada tabel V.13 berikut:

**Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Cukup Baik	Cukup Buruk	Salah	



	2	3	4	5	6
ksanaan program sudah dilakukan secara merata	4	4	4	4	4
ksanaan program hanya dilakukan di lokasi darurat	5	2	2	2	2
	2	3	4	5	6
akukan penataan dan pembangunan di lokasi	3	3	3	3	3
asyarakat dipungut biaya dalam penataan pembangunan	3	3	3	3	3
angunan seperti apa yang dibuat oleh dinas	5	2	2	2	2
angunan yang sudah dibuat tersebut bermanfaat	3	3	3	3	3
angunan tersebut menghabiskan biaya besar	4	4	4	4	4
Jumlah	0	2	2	2	2
Rata-rata	5	2	2	2	3
Persentase	%	%	%	%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.13 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator pemerataan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator pemerataan sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator pemerataan, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kawasan kumuh bisa saja dihapuskan, namun butuh proses yang lama dan modal yang besar. Selain itu juga seluruh pihak harus bekerjasama dalam mewujudkan hal tersebut. Dan yang paling terpenting adalah dari masyarakat, karena apabila masyarakat tidak bisa diajak kompromi atau menerapkan pola hidup yang kurang sehat dan tidak menjaga lingkungan, maka kawasan kumuh tidak akan dapat dihapuskan. Program Lingkungan Sehat Perumahan*

*sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, karena selama dilakukannya pembangunan pada tahun 2018, telah diatasi kawasan kumuh setengahnya, meskipun belum seluruhnya, setidaknya sudah mengurangi. Kami juga sudah melakukan penataan dan pembangunan terhadap kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Yang pasti dari segi Pemerataan, Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah terlaksana dengan cukup baik". (Wawancara : Senin, 1 September 2019).*

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator pemerataan yang terdiri dari dua sub indikator, dengan tujuh item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.14 berikut ini :

**Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pemerataan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	

	2	3	4	5	5
ksanaan program sudah dilakukan secara merata	2 (%)	3 (%)	0 (%)	0 (%)	0
ksanaan program hanya dilakukan di lokasi darurat	0 (%)	4 (%)	5 (%)	0 (%)	0
akukan penataan dan pembangunan di lokasi	8 (%)	3 (%)	4 (%)	0 (%)	0
asyarakat dipungut biaya dalam penataan pembangunan	5 (%)	2 (%)	2 (%)	0 (%)	0
angunan seperti apa yang dibuat oleh dinas	3 (%)	6 (%)	5 (%)	0 (%)	0
angunan yang sudah dibuat tersebut bermanfaat	0 (%)	3 (%)	2 (%)	0 (%)	0
angunan tersebut menghabiskan biaya besar	3 (%)	2 (%)	0 (%)	0 (%)	0
	2	3	4	5	5
Jumlah	2	8	0	0	0
Rata-rata	2	1	7	0	0
Persentase	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.



Dari tabel V.14 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator pemerataan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 40%, cukup baik dengan jumlah persentase 37%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 23%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator pemerataan sudah cukup baik dengan persentase 40%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator pemerataan, peneliti melihat bahwa realisasi program lingkungan sehat perumahan sudah cukup baik, namun belum rata. Karena pembangunan yang sudah dilakukan hanya sebagian saja, belum seluruhnya. Perlu diketahui bahwa dari delapan kawasan kumuh yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru hanya mempunyai wewenang penanganan terhadap dua kawasan saja, yakni kawasan Sumahilang dan kawasan Padang Terubuk. Sedangkan penanganan terhadap enam kawasan lainnya merupakan kewenangan Pusat dan kewenangan Provinsi.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan

Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator pemerataan sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pemerataan dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

#### **4. Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan dalam program lingkungan sehat perumahan ini dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika program ini akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak dari program ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru, dan Melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator responsivitas, dapat dilihat pada tabel V.16 berikut:

**Tabel V.16: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	
2	3	4	5	6
melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan	4 (50%)	4 (50%)	-	8
kerja pegawai Dinas pemukiman sudah baik	4 (50%)	4 (50%)	-	8
terbuka dan ramah dengan masyarakat	5 (62.5%)	2 (25%)	-	8
2	3	4	5	6
melakukan tindakan pencegahan	3 (37.5%)	-	-	8
arti apa yang dilakukan untuk mencegah	4 (50%)	4 (50%)	-	8

h merasakan manfaat dari tindakan pencegahan	3			
Jumlah	4	4		8
Rata-rata	5	2		3
Persentase	%	%	%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.16 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator responsivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator responsivitas sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator responsivitas, Beliau mengatakan bahwa :



*“Dampak negatif dari kawasan permukiman kumuh ini banyak sekali, seperti menimbulkan berbagai macam penyakit, demam berdarah, sarang nyamuk, rumah tidak teratur, bau busuk, lingkungan kotor, jorok, dan masih banyak lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini angka kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru terus meningkat, namun setelah diberlakukan program lingkungan sehat perumahan sekarang alhamdulillah ada penurunan. Tindakan pencegahan lain ada yaitu sosialisasi dengan masyarakat agar menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan, gotong royong seminggu sekali. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita ini rata-rata pemalas dan susah dikasih tau, bandel, sehingga tetap saja masih banyak lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya. Kalau dari segi responsivitas, program lingkungan sehat perumahan ini sudah cukup baik, karena kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka Kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru.*

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator responsivitas yang terdiri dari dua sub indikator, dengan enam item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.17 berikut ini :

**Tabel V.17: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Program**

**Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Buruk	Cukup Baik	Sangat Baik	
Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan	2 (20%)	8 (80%)	0	10
Peraja pegawai Dinas pemukiman sudah baik	4 (40%)	6 (60%)	0	10
Tempat tinggal ramah dengan masyarakat	5 (50%)	5 (50%)	0	10
Melakukan tindakan pencegahan	0 (0%)	0 (0%)	0	0
Tahu arti apa yang dilakukan untuk mencegah	0 (0%)	0 (0%)	0	0
Warga sudah merasakan manfaat dari tindakan pencegahan	8 (80%)	2 (20%)	0	10
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Persentase</b>	<b>11%</b>	<b>33%</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.17 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator responsivitas, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 44%, cukup baik dengan jumlah persentase 53%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 3%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator responsivitas sudah cukup baik dengan persentase 50%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator responsivitas, peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan pemukiman kumuh, yaitu dengan membuat dan merealisasikan program lingkungan sehat perumahan di Kelurahan Padang Terubuk. Masyarakat sangat senang dan mengapresiasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman karena telah melakukan pembangunan untuk mengatasi pemukiman kumuh dilingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu juga masyarakat turut bangga karena telah di ikutsertakan dalam proses merealisasikan pembangunan drainase, pedestrian dan hydrant kebakaran. Yaitu dengan merekrut masyarakat yang mau

bekerja dan memiliki kemampuan dan keahlian untuk manjadi bagian dari pekerja dalam membuat pembangunan tersebut.

Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator responsivitas sudah cukup baik.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

## **5. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program lingkungan sehat perumahan dan dari kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah langkah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari langkah yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak.

Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman cenderung kumuh di Kota



Pekanbaru, dan Pelaksanaan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden pegawai yang berjumlah 8 orang terhadap indikator ketepatan, dapat dilihat pada tabel V.19 berikut:

**Tabel V.19: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Baik	Baik Sekali	Buruk	
Apakah melakukan perencanaan dan pendataan	3 (37,5%)	2 (25%)	3 (37,5%)	8
Apakah yang ditetapkan tersebut sudah tepat	5 (62,5%)	2 (25%)	1 (12,5%)	8
Apakah pegawai sudah pengalaman dalam bekerja	5 (62,5%)	2 (25%)	1 (12,5%)	8
Apakah melakukan pendataan dan perencanaan	3 (37,5%)	2 (25%)	3 (37,5%)	8

isi yang ditetapkan tersebut sudah tepat	5 (%)	2 (%)		
swai yang bertugas mendata sudah pengalaman	5 (%)	2 (%)		
ka kawasan permukiman kumuh menurun	4 (%)	4 (%)		
Jumlah	4	2		6
Rata-rata	5	2		
Persentase	%	%	%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.19 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 8 responden pegawai terhadap item yang dinilai dalam indikator ketepatan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 75%, cukup baik dengan jumlah persentase 25%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 0%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan sudah baik dengan persentase 75%, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Ir. Muhammad Amin, M.Eng selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru mengenai indikator ketepatan, Beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau menurut saya dari segi ketepatan, Program Lingkungan Sehat Perumahan ini sudah cukup baik dan sudah tepat. Karena program ini telah direalisasikan di tempat dimana memang sesuai dengan kebutuhan. Karena kewenangan dinas kami kan menangani dua kawasan, yakni kawasan padang terubuk dan kawasan sumahilang. Dan untuk tahun 2018 kami telah membangun di kawasan padang terubuk. Kemudian untuk tahun 2019 ini kami akan melakukan pembangunan di kawasan sumahilang. Kemudian menilai Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru sudah cukup baik, karena sudah terealisasi di satu kawasan, yakni kawasan padang terubuk. Kemudian kalau untuk faktor penghambatnya itu adalah dari segi anggaran. Selain itu faktor masyarakat nya yang kurang peduli dengan lingkungan, seperti tidak membudayakan gotong royong, buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Padahal kami sudah sering mengingatkan untuk menciptakan pola hidup sehat, baik melalui sosialisasi maupun melalui papan peringatan”.* (Wawancara : Senin, 1 September 2019).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden masyarakat yang berjumlah 30 orang responden terhadap indikator ketepatan yang terdiri dari dua sub indikator, dengan tujuh item pertanyaan yang dinilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.20 berikut ini :

**Tabel V.20: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Baik	Cukup Baik	Cukup Buruk	
Apakah telah melakukan perencanaan dan pendataan	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0
Apakah peraturan yang ditetapkan tersebut sudah tepat	4 (13.3%)	0 (0%)	5 (16.7%)	9
Apakah pegawai sudah berpengalaman dalam bekerja	5 (16.7%)	5 (16.7%)	0 (0%)	10
Apakah telah melakukan pendataan dan perencanaan	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0



isi yang ditetapkan tersebut sudah tepat	0 (%)	0 (%)		0
wai yang bertugas mendata sudah pengalaman	8 (%)	2 (%)		0
a kawasan permukiman kumuh menurun	5 (%)	5 (%)		0
Jumlah	22	2	5	0
Rata-rata	6	2	2	0
Persentase	%	%	%	0%

Sumber : Data Olahan 2019.

Dari tabel V.20 diatas dapat diketahui bahwa jawaban dari 30 responden masyarakat terhadap item yang dinilai dalam indikator ketepatan, jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing kategori penilaian yang terdiri dari : Baik dengan jumlah persentase 53%, cukup baik dengan jumlah persentase 40%, dan kurang baik dengan jumlah persentase 7%.

Dari data dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan sudah cukup baik dengan persentase 53%, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner pada responden masyarakat di kawasan pemukiman kumuh Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator ketepatan, peneliti melihat bahwa program lingkungan sehat perumahan yang direalisasikan pada tahun 2018 di Kelurahan Padang Terubuk sudah tepat dan sudah terlaksana dengan cukup baik. Karena kelurahan padang terubuk merupakan salah satu dari delapan kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru. Dari delapan kawasan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki kewenangan untuk menangani dua kawasan yaitu kawasan padang terubuk dan kawasan sumahilang. Enam kawasan lainnya merupakan kewenangan penanganan pusat dan provinsi. Kemudian untuk tahun 2019, program lingkungan sehat perumahan akan di realisasikan di kawasan Sumahilang.

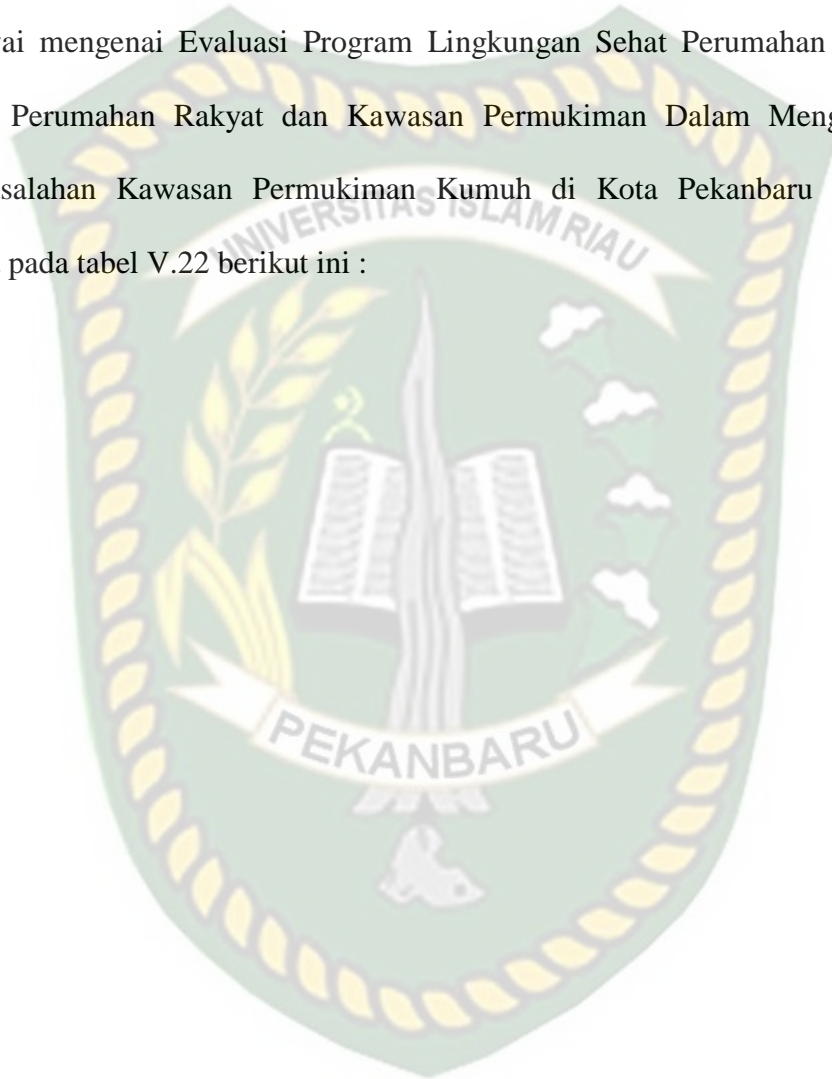
Jadi berdasarkan pemaparan hasil observasi peneliti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dalam indikator ketepatan sudah cukup baik.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menyertakan data sekunder sebagai data pendukung yang akan menguatkan dalam pengambilan kesimpulan akhir mengenai kategori penilaian pada indikator ketepatan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan dalam penelitian Evaluasi Program Lingkungan

Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden pegawai mengenai Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.22 berikut ini :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Tabel V.22 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Baik	Cukup Baik	Cukup Buruk	
Efektivitas	6 (75%)	2 (25%)	0 (0%)	8
Kecukupan	4 (50%)	4 (50%)	0 (0%)	8
Pemerataan	6 (75%)	2 (25%)	0 (0%)	8
Responsivitas	6 (75%)	2 (25%)	0 (0%)	8
Ketepatan	6 (75%)	2 (25%)	0 (0%)	8
Jumlah	28	12	0	40
Rata-rata	6	2	0	8
Persentase	75%	25%	0%	100%

Sumber : Data Olahan, 2019.

Dari tabel V.22 rekapitulasi tanggapan responden pegawai terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori



penilaian Baik yaitu sebesar 75% (6 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 25% (2 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 0% (0 responden), dari total keseluruhan responden pegawai sebanyak 8 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini dikategorikan Baik Dengan total persentase sebesar 75% (6 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik, artinya semua indikator sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat mengenai Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel V.23 berikut ini :

**Tabel V.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
	Baik	Cukup Baik	Cukup Buruk	
Efektivitas	13 (43%)	15 (50%)	2 (7%)	30
Kecukupan	11 (37%)	12 (40%)	7 (23%)	30
Pemerataan	12 (40%)	11 (37%)	7 (23%)	30
Responsivitas	13 (44%)	16 (53%)	1 (3%)	30
Ketepatan	16 (53%)	12 (40%)	2 (7%)	30
Jumlah	65	66	19	150
Rata-rata	13	13	4	30
Persentase	43%	53%	14%	100%

Sumber : Data Olahan, 2019.

Dari tabel V.23 rekapitulasi tanggapan responden masyarakat terhadap Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru diatas,

untuk kategori penilaian Baik yaitu sebesar 43% (13 responden), untuk kategori penilaian Cukup Baik adalah sebesar 43% (13 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Baik adalah 14% (4 responden), dari total keseluruhan responden masyarakat sebanyak 30 orang tersebut masuk dalam kategori cukup baik.

#### **H. Faktor Penghambat Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya :

1. Efektifitas

Kurang optimalnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melakukan sosialisasi dari program Lingkungan Sehat Perumahan kepada masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh.

2. Kecukupan

dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan permukiman kumuh.

### 3. Pemerataan

Kurangnya kadilan yang diperoleh dan di dapat oleh masyarakat dalam pelaksanaan suatu program, Karna suatu program tertentu dapat efektif dan efisien apabila biaya dan manfaat merata.

### 4. Responsifitas

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu program Lingkungan Sehat Peruman, masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya dalam kebersihan lingkungan masih rendah yakni masih suka membuang sampah sembarangan dan tidak pernah gotong royong bersama.

### 5. ketepatan

Kurangnya pelaksanaan pendataan yang dilakukan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kumuh terhadap kawasan permukiman cenderung kumuh.



## **BAB VI PENUTUP**

### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru:

1. Dilihat dari hasil penyebaran kuisioner dan wawancara yang peneliti lakukan mengenai program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tergolong cukup baik.
2. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan dilihat dari beberapa indikator di antaranya efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan peneliti mengetahui faktor-faktor penghambat program Lingkungan Sehat Perumahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya: kurangnya sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh mengenai program Lingkungan Sehat Perumahan serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah, yang dimana masyarakat di kawasan permukiman kumuh suka membuang sampah sembarangan dan tidak pernah melakukan gotong royong bersama.

## J. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah:

1. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Padang Terubuk mengenai program Lingkungan Sehat Perumahan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga dan merawat hasil pembangunan yang telah diberikan. Sehingga pembangunan yang telah dibuat tidak sia-sia dan program Lingkungan Sehat Perumahan dapat bermanfaat dalam jangka panjang.
2. Kepada masyarakat di kawasan Padang Terubuk agar lebih sadar dan peka terhadap kebersihan lingkungan, baik itu kesadaran secara individual untuk tidak membuang sampah sembarangan, maupun secara bergotong-royong membersihkan lingkungan dalam seminggu sekali. Kemudian bersama-sama merawat hasil pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tujuan dari program Lingkungan Sehat Perumahan untuk mengatasi permasalahan kawasan pemukiman kumuh di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literature

- Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Abdul, Wahab. 2002. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al-Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Korayati, Nyimas Dwi, dkk, 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta, YPAPI.
- Mardalis, 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing : Pekanbaru, Riau
- Ndaraha Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan evaluasi)*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Nawawi, Ismail, 2007. *Public Policy Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya, CV. Pitra Media Nusantara.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.

- Pramudji, 2002. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Makasar: Refika Aditama.
- Syafrinaldi. 2017. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.
- Wasistiono, Sadu. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.
- Winarno, Budi. 2012, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: GAPS.

### **Media/Dokumen**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Pekanbaru.



Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**